



Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kampung
Kabupaten Way Kanan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

Jalan Camat Mas Enggung No.12
Komplek Perkantoran PEMDA
Blambangan Umpu
2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 merupakan penjabaran kinerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan sebagai lembaga pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung Kabupaten Way Kanan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini disusun berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023. Adapun tujuan penyusunan laporan ini untuk memberikan informasi tentang rencana pelaksanaan tugas dan hasil-hasil yang akan dicapai sehingga dapat dijadikan landasan untuk menetapkan strategik pembangunan ke depan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan.

Semoga laporan Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini dapat digunakan sebagai sumber data dan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang memerlukannya.

Blambangan Umpu, Januari 2023

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
KABUPATEN WAY KANAN



RYUAN AHMADI, S.Sos., MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19751101 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Dasar Hukum.....	2
1.4 Tugas dan Fungsi Dinas PMK Kabupaten Way Kanan	4
BAB II ARAH KEBIJAKAN	6
2.1 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	6
2.2 Tujuan dan Sasaran	9
2.3 Strategi	11
2.4 Kebijakan	12
BAB III PERENCANAAN PROGRAM KEGIATAN	13
3.1 Program dan Penjabaran Program dalam Kegiatan.....	13
3.2 Cara Melaksanakan Kegiatan.....	17
BAB IV PENUTUP	20

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.2.1 Tujuan Dinas PMK	9
Tabel 2.2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	10
Tabel 3.1 Program dan Kegiatan	13
Tabel 3.2 Cara Pelaksanaan Kegiatan	17

Lampiran-lampiran :

1. Tabel IKU Dinas PMK 2021-2026.
2. Matrik RKT Dinas PMK 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas PMK Kabupaten Way Kanan adalah rencana yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan pada Tahun 2023.

b. Tujuan

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

- Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;
- Pencapaian sasaran yang efektif, efisien, realistis dan tepat sasaran;
- Implementasi Akuntabilitas Kinerja Dinas PMK Kabupaten Way Kanan.

1.3. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- g. Intruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Kabupaten Way Kanan;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021–2026;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 10);
- t. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 41);

1.4. TUGAS DAN FUNGSI DINAS PMK KABUPATEN WAY KANAN

a. Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan kampung, dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 50 Tahun 2018).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN

2.1. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Menelaah Visi, misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut.

Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas PMK Kabupaten Way Kanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Kabupaten Way Kanan, maka Visi Pembangunan Tahun 2021-2026 yaitu : ***“Way Kanan Unggul dan Sejahtera”***

Untuk Mewujudkan Visi tersebut diatas dirumuskan Misi Pemerintah Kabupaten Way Kanan, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik.
Untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Way Kanan diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan memperkuat kelembagaan organisasi perangkat daerah yang selaras dengan pencapaian visi misi daerah dan didukung dengan aparatur sipil negara

yang kompeten berbasis kinerja. Selain itu dikembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan berupaya melaksanakan pelayanan publik yang semakin baik;

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari dukungan kualitas lingkungan hidup. Keberadaan kawasan hutan, dan 6 sungai besar dengan daerah tangkapan airnya perlu terus dijaga dan dilestarikan sehingga ketersediaan air tetap terjaga dimasa depan. Selain itu upaya pencegahan pencemaran terus ditingkatkan.

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dimulai dari mempersiapkan SDM dari masa kehamilan, kelahiran, perkembangan dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Hal ini dilakukan melalui upaya meningkatkan kesehatan, memenuhi kebutuhan gizi dan pangan, membangun karakter dan meningkatkan kualitas pengetahuan melalui pendidikan, perlindungan anak, perlindungan perempuan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, memberdayakan masyarakat miskin, memberikan perlindungan dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan bagi lansia, serta didukung lingkungan yang aman dan kondusif. Seiring dengan itu, perlu peningkatan kompetensi sumberdaya manusia daerah dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja yang ada terutama dalam menyambut “Bonus Demografi”.

Disamping itu, perlu upaya seluruh pemangku kepentingan menghadapi pandemic covid 19 terutama dalam rangka adaptasi terhadap kebiasaan baru;

Misi 4 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur. Memperkuat perekonomian Kabupaten Way Kanan dengan mengembangkan potensi dan keunggulan berbasis kawasan di sektor pertanian, kemudian di tingkatkan nilai tambahnya melalui industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang baik perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Di wilayah sentra penanaman padi perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur sumberdaya air yang memadai baik bendungan, maupun saluran irigasi. Untuk memperlancar distribusi sarana prasarana produksi maupun pemasaran hasil perlu didukung oleh jalan-jalan strategis yang menghubungkan sentra-sentra produksi pertanian ke pusat-pusat pemasaran. Selain itu didorong membangun sinergitas antar kampung dalam mengembangkan produk unggulan.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka

pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Way Kanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung berkontribusi untuk mewujudkan seluruh misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan.

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan, Misi utama dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan yaitu pada **“Misi 1, yaitu Menyelenggarakan Pemerintahan yang Baik, dan Misi 3, yaitu Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia”**.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN

2.2.1. TUJUAN

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi pemerintah Kabupaten Way Kanan, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud, di samping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap isu strategis yang telah ditetapkan.

Tabel. 2.2.1

Tujuan Dinas PMK Kabupaten Way Kanan

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP
2.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung	Indeks Desa Membangun

Untuk pencapaian tujuan Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan adalah :

1. Mengembangkan keswadayaan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan;
2. Memantapkan kondisi sosial budaya masyarakat yang kondusif untuk proses pembangunan;

3. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat sebagai basis perekonomian daerah;
4. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mendayagunakan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan;
5. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menciptakan, mengembangkan, memasyarakatkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam;
6. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pemerintahan kelurahan.

2.2.2. SASARAN

Untuk pencapaian tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, maka disusun Sasaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, yakni :

Tabel. 2.2.2

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP Dinas PMK
2.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung	Meningkatkan Kualitas Kampung	Indeks Kategori Kampung
		Meningkatnya Ketahanan Ekonomi	Nilai Indeks Ketahanan Ekonomi
		Meningkatnya Ketahanan Sosial	Nilai Indeks Ketahanan Sosial
		Meningkatnya Ketahanan Lingkungan	Nilai Indeks Ketahanan Lingkungan

Pencapaian Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 yang bertujuan meningkatkan

keberdayaan dan partisipasi masyarakat ditentukan oleh sasaran sebagai berikut :

- a. Berkurangnya masyarakat miskin;
- b. Bertambahnya usaha ekonomi masyarakat;
- c. Bertambahnya kampung berprestasi;
- d. Meningkatkan kemandirian masyarakat;
- e. Meningkatkan kapasitas aparatur kampung;
- f. Meningkatkan Pelayanan Posyandu;
- g. Meningkatkan penguasaan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG).

2.3. STRATEGI

Sejalan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah maka Strategi yang akan digunakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung adalah :

1. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, difokuskan pada peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yang tercermin dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
2. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang sosial budaya difokuskan pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam seluruh bidang sosial budaya, yaitu peningkatan apresiasi masyarakat terhadap sistem nilai sosial budaya, termasuk nilai-nilai sosial budaya lokal, peningkatan taraf pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan keluarga serta aspek terkait lainnya;
3. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang politik, difokuskan pada penguatan pemahaman masyarakat tentang hakikat demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelenggaraan pemerintahan kampung dan kelurahan;
4. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang lingkungan, difokuskan pada peningkatan akses masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup agar dapat didayagunakan secara berkelanjutan.

2.4. KEBIJAKAN

Arah Kebijakan yang diambil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung terdiri atas :

(1) Kebijakan Internal :

- Mengadakan pelatihan bagi aparatur kampung/kelurahan untuk menambah keahlian dan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugasnya dalam bidang pemerintahan, peraturan-peraturan, administrasi, pengelolaan keuangan dan sebagainya;
- Mengedepankan fasilitasi untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan program-program pemberdayaan masyarakat;
- Mengembangkan komunikasi, konsultasi dan diskusi publik bersama masyarakat dalam menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan;
- Mencari dukungan dana yang bersumber dari APBN, APBD dan Swadaya Masyarakat untuk mendukung dalam pengelolaan pelaksanaan program-program pembangunan.

(2) Kebijakan Eksternal :

- Menampung aspirasi masyarakat dan peka terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat;
- Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu dengan cara memberikan kepercayaan yang banyak kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri;
- Menyiapkan masyarakat dibidang pengetahuan, keterampilan dan pendampingan;
- Membuka dialog dengan masyarakat;
- Membuka jalur informasi masyarakat;
- Memberi bantuan modal sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan dan menggali sumber daya alam dan pengembangan sumber daya manusia;
- Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan manajemen;
- Penguatan lembaga-lembaga sosial ekonomi.

BAB III
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 PROGRAM DAN PENJABARAN PROGRAM KE DALAM KEGIATAN

Untuk mengimplementasikan kebijakan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (Renstra-Dinas PMK) Kabupaten Way Kanan secara terpadu dan tepat sasaran serta tepat kegiatan, maka diperlukan program prioritas yang di tuangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2023 untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi. Program dan Kegiatan Prioritas yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan

PROGRAM	PENJABARAN PROGRAM KE DALAM KEGIATAN		
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas PMK		
01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
02. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen
03. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan
04. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Profesionalitas ASN Dinas PMK		

01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan
02.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen
03.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan
04.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas PMK	
01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
02.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket
03.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
04.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan
05.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
06.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Jaringan Internet	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Laporan

		yang Disediakan	
07. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan
08. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit
09. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
10. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit
11. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket
12. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit
4. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Cakupan Kerjasama Kampung	
01. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten / Kota	1	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen
5. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Cakupan Tertib Administrasi Kampung	
01. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen
02. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	221	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen
03. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	221	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang

05. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen
06. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung	118	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan
6. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Cakupan Kampung Tertib Administrasi Keuangan Kampung dan Aset Kampung	
01. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen
02. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen
03. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	21	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen
04. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen
7. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Cakupan Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat Kampung	
01. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna, Lembaga Adat Desa/kelurahan dan	Dokumen

		Masyarakat Hukum Adat	
02.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
03	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
04	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa

3.2 CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

Implementasi dari penjabaran program ke dalam kegiatan yang dituangkan pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Cara Pelaksanaan Kegiatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah	1.1.5. Meningkatkan kualitas saking SKPD	1.1.5.9. Meningkatkan kualitas saking Dinas PMK	1. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
			2. Melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
			3. Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
			4. Melakukan Evaluasi kinerja perangkat daerah
1.6. Meningkatnya kinerja organisasi	1.6.2. Meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara	1.1.5.9. Meningkatkan kualitas saking Dinas	1. Melakukan penyediaan gaji dan tunjangan ASN

		PMK	<p>2. Melakukan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD</p> <p>3. Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD</p> <p>4. Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD</p>
	1.6.4. Menyelenggarakan administrasi umum perangkat daerah	1.1.5.9. Meningkatkan kualitas saking Dinas PMK	<p>1. Melakukan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor</p> <p>2. Melakukan penyediaan bahan logistik kantor</p> <p>3. Melakukan penyediaan barang cetakan dan penggandaan</p> <p>4. Melakukan fasilitasi kunjungan tamu</p> <p>5. Melakukan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</p> <p>6. Melakukan pengadaan peralatan dan mesin lainnya</p> <p>7. Melakukan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik</p> <p>8. Melakukan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p>9. Melakukan penyediaan jasa pelayanan umum kantor</p> <p>10. Melakukan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>11. Melakukan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya</p>
MISI III : (MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.9. Meningkatnya keberdayaan masyarakat kampung	1.9.1. Meningkatkan kualitas kampung	3.9.1.2. Meningkatkan kerjasama kampung	1. Melakukan fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota
		3.9.1.3. Meningkatkan tertib administrasi kampung	<p>1. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa</p> <p>2. Melakukan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa</p> <p>3. Melakukan fasilitasi penyusunan profil kampung</p>

		4. Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPK
		5. Melakukan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan
	3.9.1.4. Meningkatkan tertib administrasi keuangan kampung dan aset kampung	1. Melakukan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa
		2. Melakukan fasilitasi pengelolaan keuangan kampung
		3. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa
		4. Melakukan fasilitasi pengelolaan aset kampung
	3.9.1.5. Pemberdayaan lembaga sosial kemasyarakatan kampung	1. Melakukan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat
	3.9.1.6. Mengembangkan kampung percontohan	
	3.9.1.7. Mengembangkan smart village	2. Melakukan fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna
		3. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa
		4. Melakukan fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan akan merencanakan 4 (empat) Program yang dijabarkan kedalam 34 (tiga puluh empat) kegiatan. Untuk mencapai program dan kegiatan yang telah direncanakan, maka harus didukung dengan Anggaran yang memadai yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 disusun dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan merupakan acuan ukuran yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan untuk kurun waktu satu tahun.

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN ANGGARAN 2023**

SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan

Sasaran				Prog.	Kegiatan				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat					1,971,817,100				
Program Kerja PKK	Terselenggaranya program kerja PKK Kabupaten Way Kanan	Dokumen	1	1. Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Input : - Dana - SDM	Rupiah	589,640,100		
					Output : Terselenggaranya program kerja PKK Kabupaten Way Kanan				
					Outcome : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1		
Pelatihan Kader Posyandu	Meningkatnya pengetahuan kader posyandu	Dokumen	1	2. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Input : - Dana - SDM	Rupiah	275,977,000		
					Output : Meningkatnya pengetahuan kader posyandu				
					Outcome : Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna, Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1		
Kegiatan TMMD dan BBGRM	Meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat dalam bergotong royong	Dokumen	1	3. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Input : - Dana - SDM	Rupiah	1,106,200,000		
					Output : Meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat dalam bergotong royong				
					Outcome : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	1		
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa					86,805,000				
Pelatihan BUM Desa	Meningkatnya pengetahuan pengurus Bumdes dalam pengelolaan Bumdes	Dokumen	50	1. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Input : - Dana - SDM	Rupiah	86,805,000		
					Output : Meningkatnya pengetahuan pengurus Bumdes dalam pengelolaan Bumdes				
					Outcome : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	50		

Sasaran				Prog.	Kegiatan				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					4. Program Peningkatan Kerjasama Desa				44,342,000
Pelaksanaan Kerjasama antar desa	Terlaksananya kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota	Dokumen	1		1. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten / Kota	Input :			
						- Dana	Rupiah	44,342,000	
						- SDM			
						Output :			
						Terlaksananya kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota			
						Outcome :			
						Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen		1
					6. Program Administrasi Pemerintahan Desa				1,391,102,300
Pelatihan Aparatur Kampung	Meningkatnya pengetahuan aparatur kampung dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung	Kampung	221		1. Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Input :			
						- Dana	Rupiah	275,709,600	
						- SDM			
						Output :			
						Meningkatnya pengetahuan aparatur kampung dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung			
						Outcome :			
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen		1
Pemilihan Kepala Kampung secara serentak	Terlaksananya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara serentak tahun 2023	Kampung	118		2. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Input :			
						- Dana	Rupiah	952,892,700	
						- SDM			
						Output :			
						Terlaksananya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara serentak tahun 2023			
						Outcome :			
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Dokumen		1
Terlatihnya Aparatur Kampung dalam Bidang Pengelolaan Aset Kampung	Aparatur Kampung	Kampung	221		2. Fasilitasi pengelolaan aset desa	Input :			
						- Dana	Rupiah	162,500,000	
						- SDM			
						Output :			
						Terlatihnya aparatur kampung dalam pengelolaan aset desa			
						Outcome :			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen		1
					7. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat				119,652,900
Peningkatan Pemanfaatan TTG sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat	Meningkatkan Pengetahuan dan Kelompok Binaan Pengembangan TTG	Laporan	1		1. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan TTG	Input :			
						- Dana	Rupiah	119,652,900	
						- SDM			
						Output :			
						Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap TTG			
						Outcome :			
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan		1

Sasaran				Prog.	Kegiatan				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8. Program Administrasi Pemerintahan Desa				196,889,200
Meningkatnya Tertib Administrasi Aparatur Kampung dalam Pengelolaan Keuangan Kampung	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kampung	Kampung	221		1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Input :			
						- Dana - SDM	Rupiah	122,348,900	
						Output : Terlaksananya pengelolaan keuangan kampung			
						Outcome : Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Kampung	Dokumen	1	
Meningkatnya Tertib Administrasi Aparatur Kampung dalam Pengelolaan Keuangan Kampung	Memberikan Pengetahuan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan dan Aset Kampung (SISKEUDes)	Kampung	221		2. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Input :			
						- Dana - SDM	Rupiah	74,540,300	
						Output : Terlaksananya Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Kampung			
						Outcome : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	1	
					9. Program Administrasi Pemerintahan Desa				303,661,300
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Terlaksananya dan Terpilihnya Kampung Berprestasi	Kecamatan	14		1. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Input :			
						- Dana - SDM	Rupiah	92,617,900	
						Output : Terlaksananya kampung berprestasi			
						Outcome : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	1	
Meningkatnya Tertib Administrasi Aparatur Kampung	Meningkatnya Kualitas Ketua dan Anggota BPK	Kampung	221		2. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Input :			
						- Dana - SDM	Rupiah	79,800,000	
						Output : Terlaksananya pembinaan anggota BPD dalam peningkatan kapasitas			
						Outcome : Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	221	

Sasaran				Prog.	Kegiatan				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tersedianya Profil Kampung	Aparatur Kampung	Kampung	221		3. Fasilitasi penyusunan profil desa	Input : - Dana - SDM	Rupiah	131,243,400	
						Output : Terlaksananya penyusunan profil desa			
						Outcome : Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	1	
10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								2,674,367,785	
Peningkatan Kapasitas Kebijakan Pemerintah dalam mendukung Kesejahteraan Masyarakat	Belanja Telepon Belanja Air Belanja Listrik Belanja Surat Kabar	Bulan	12		1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : - Dana - SDM	Rupiah	127,740,000	
						Output : Tersedianya jaringan internet, listrik dan air			
						Outcome : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan Pegawai	Orang	22		2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Input : - Dana - SDM	Rupiah Orang	1,977,761,700 22	
						Output : Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	
						Outcome : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	22	
Meningkatnya Kesejahteraan Pengelola Keuangan	Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan Dinas PMK	Bulan	12		3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Input : - Dana - SDM	Rupiah Orang	115,800,000 12	
						Output : Terlaksananya administrasi keuangan			
						Outcome : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	

Sasaran				Prog.	Kegiatan				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya Kebersihan, kerapian dan keamanan serta ketertiban kantor	- Honorarium Petugas Jaga malam, Sopir Jabatan dan Petugas Kebersihan	Bulan	12	4. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Input :				
	- Peralatan kebersihan dan bahan pembersih				- Dana	Rupiah	54,143,000		
					- SDM				
					Output :				
					Tersedianya honorarium petugas kebersihan kantor, petugas jaga malam, driver eselon II dan alat-alat kebersihan kantor				
					Outcome :				
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1		
terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kerja dengan baik	Perbaiki peralatan dan perlengkapan kerja :	Bulan	12	5. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Input :				
	- Komputer PC				- Dana	Rupiah	9,200,000		
	- Laptop				- SDM				
	- Printer				Output :				
	- AC				Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kerja (komputer PC, laptop, printer dan AC)				
					Outcome :				
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	16		
Alat Tulis Kantor	Terlaksananya belanja ATK selama 1 tahun	Bulan	12	6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Input :				
					- Dana	Rupiah	27,393,385		
					- SDM				
					Output :				
					Tersedianya alat tulis kantor				
					Outcome :				
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1		
Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penggandaan dan foto copy selama 1 tahun	paket	1	7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input :				
					- Dana	Rupiah	3,582,700		
					- SDM				
					Output :				
					Tersedianya barang cetak dan penggandaan				
					Outcome :				
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1		
Berfungsinya Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Alat Alat Listrik dan elektronik	Bulan	12	8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input :				
					- Dana	Rupiah	3,066,000		
					- SDM				
					Output :				
					Tersedianya komponen alat-alat listrik/penerangan gedung kantor				
					Outcome :				
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1		

Sasaran				Prog.	Kegiatan				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Menyelenggarakan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Laporan	1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input : - Dana - SDM Output : Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah Outcome : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rupiah	186,700,000	1
Berfungsi kendaraan dinas dengan baik	Penggantian suku cadang kendaraan dinas dan pembayaran pajak mobil dinas	Bulan	12	10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Input : - Dana - SDM Output : Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas dan pembayaran pajak kendaraan Outcome : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Rupiah	50,000,000	2
Terpeliharanya bangunan gedung kantor dengan baik	pemeliharaan bangunan gedung kantor	Unit	2	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Input : - Dana - SDM Output : Terpeliharanya bangunan gedung kantor Outcome : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rupiah	65,000,000	2
Makanan dan Minuman Rapat Tamu	Tersedianya makanan dan minuman Rapat	Laporan	1	12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Input : - Dana - SDM Output : Tersedianya makan minum Tamu Outcome : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rupiah	8,220,000	1
Pakaian PDH ASN	Terwujudnya Disiplin pegawai	Paket	1	13	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Input : - Dana - SDM Output : Terwujudnya disiplin Pegawai Outcome : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Rupiah	18,600,000	1
Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kerja	Unit	2	14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input : - Dana - SDM Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kerja Outcome : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Rupiah	27,161,000	2
12. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								8,197,000	
Tersedianya LAKIP SKPD	LAKIP SKPD	Dokumen	1	1.	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : - Dana - SDM Output : Tersedianya laporan lakip skpd Outcome : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rupiah	1,296,000	1

Sasaran				Prog.	Kegiatan				Ket.	
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Input : - Dana - SDM Output : Tersedianya laporan keuangan akhir tahun skpd Outcome : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rupiah	1,586,000	1		
Tersusunnya Lakip SKPD	Dokumen LAKIP	Laporan	1	4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Input : - Dana - SDM Output : Tersedianya laporan lakip Outcome : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rupiah	1,688,000	1		
Tersedianya Dokumen RENJA dan Evaluasi RENJA	Tersusunnya RENJA dan Evaluasi RENJA	Dokumen	1	5. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Input : - Dana - SDM Output : Tersedianya renstra, renja dan evaluasi renja Outcome : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rupiah	1,126,000	1		
Tersedianya Dokumen RKA SKPD	Tersusunnya RKA SKPD	Dokumen	1	6. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Input : - Dana - SDM Output : Tersedianya RKA dan DPA SKPD Outcome : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rupiah	1,175,000	1		
Jumlah Total								6,796,834,585		

Blambangan Umpu, Januari 2023
 KEPALA DINAS
 PEMBUDIDHAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
 KABUPATEN WAY KANAN,


 IXUAN ALMADI, S.Sos., MM
 Kepala Dinas Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19751101 199503 1 001


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN WAY KANAN
 NOMOR : 050/257/IV.13-WK/2022
 TANGGAL : 16 November 2022
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG TAHUN 2021-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN WAY KANAN
 TAHUN 2021-2026**

Misi 1 : Menyelenggarakan Pemerintahan yang Baik.
 Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia.

NO	TUJUAN SKPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	5	6	7	8	9					
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP			Penilaian Inspektorat Kabupaten Way Kanan (APIP)	Poin	58,64	59,64	60,64	61,64	62,64	63,64
			Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP Dinas PMK	Penilaian Inspektorat Kabupaten Way Kanan (APIP)	Poin	64,16	65,16	66,16	67,16	68,16	69,16
2.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung	Indeks Desa Membangun			Rilis Kemendesa	Poin	0,6558	0,6583	0,6608	0,6633	0,6658	0,6683
			Meningkatkan Kualitas Kampung	Indeks Kategori Kampung	Rilis Kemendesa	Poin	3,05	3,13	3,19	3,25	3,29	3,29
			Meningkatnya Ketahanan Ekonomi	Nilai IKE	Sesuai rumus IDM bagian IKE	Poin	0,5517	0,5925	0,6333	0,6741	0,7149	0,7557
			Meningkatnya Ketahanan Sosial	Nilai IKS	Sesuai rumus IDM bagian IKS	Poin	0,7718	0,7957	0,8196	0,8435	0,8638	0,8841
			Meningkatnya Ketahanan Lingkungan	Nilai IKL	Sesuai rumus IDM bagian IKL	Poin	0,6423	0,6854	0,7285	0,7716	0,8147	0,8578

**KEPALA DINAS
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DAN KAMPUNG KABUPATEN WAY KANAN,**



IXUAN AHMADI, S.Sos., MM
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19751101 199503 1 001